

Abstract

The purpose of this study was to see and analyze the processes of supporting and inhibiting village fund allocation policies in Enggros Village, Abepura District, Jayapura City. The results showed that the implementation of village fund allocation policies in Enggros Village was generally well implemented. With this, various supporting factors were found in the implementation of village fund allocation policies in Enggros that could be imitated by surrounding villages. This fact is revealed from five aspects of village fund management policy implementation consisting of transparency, accountability, responsibility, independence, and equality and fairness. Implementation of village fund allocation policies requires structuring resources that have competence in managing village fund allocation policies. However, the management of human resources is incompetent, there is no standard operating procedure (SOP) available, and the successful implementation of the village fund allocation policy is very closely related to the inter-executive unit. However, this is not an obstacle for Enggros village because in general the allocation and management of village funds is managed in a transparent manner and promotes community participation.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis proses pendukung dan penghambat kebijakan alokasi dana desa di Desa Enggros Kecamatan Abepura Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Enggros secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, ditemukan berbagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Enggros yang dapat ditiru oleh desa sekitar. Fakta tersebut terungkap dari lima aspek implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, serta kesetaraan dan keadilan. Implementasi kebijakan alokasi dana desa memerlukan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam mengelola kebijakan alokasi dana desa. Namun, pengelolaan sumber daya manusianya tidak kompeten, tidak ada standar operasional prosedur (SOP), dan keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa sangat erat kaitannya dengan antar unit pelaksana. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi desa Enggros karena pada umumnya alokasi dan pengelolaan dana desa dikelola secara transparan dan mengedepankan partisipasi masyarakat.